



Dampak Kerusakan Dermaga Pemerintah Masih Terasa

SUKADANA - Rusaknya dermaga milik pemerintah beberapa tahun lalu masih memberikan dampak terhadap ekonomi Kabupaten Kayong Utara hingga saat ini. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kayong Utara, Wardana, menjelaskan bahwa sebelum dermaga pemerintah rusak, dermaga tersebut masih digunakan sebagai lokasi tambat dan labuh kapal feri milik ASDP. Akibatnya, pemenuhan suplai kebutuhan bagi Kayong Utara hanya mencapai 30%, sementara sisanya diguna-

kan untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Ketapang dan daerah lainnya.

"Kayong Utara kita ketahui sebagai wilayah transit. Beberapa tahun yang lalu, sebelum dermaga kita rusak, mobilisasi yang masuk ke Kayong hanya 30% untuk mensuplai kebutuhan di sini. Sisanya digunakan untuk menyuplai Ketapang dan daerah lain," kata Wardana.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten tidak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak pihak ASDP menggunakan

lahan milik Haji Marhali sebagai tempat tambat dan labuh kapal feri. Menurutnya, pemerintah daerah tidak diperkenankan menarik retribusi jika fasilitas yang digunakan bukan milik pemerintah daerah.

"Kalau terkait PAD, kami hanya bisa menarik dari fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada banyak jenis PAD, seperti biaya tambat dan retribusi orang dan barang. Jika menggunakan fasilitas luar, kami tidak bisa menarik PAD, tapi bisa menarik pajak," ujarnya.

Wardana menambahkan bahwa faktor angkutan dan biaya angkutan sangat menentukan harga barang. Sejak menggunakan lahan Haji Marhali sebagai tempat sandar kapal feri, tiket kapal feri ASDP mengalami selisih harga sebesar Rp110.000 dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

"Untuk bahan pokok, sektor angkutan sangat menentukan. Kami tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah, dan sering menemui dinamika dari sektor angkutan serta kebiasaan masyarakat," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa jalur distribusi sembako ke Kayong Utara justru melalui dermaga-dermaga sungai di daerah tersebut.

"Untuk Kayong Utara, ada empat pelabuhan utama yang digunakan hingga hari ini untuk keluar masuknya bahan pokok. Pelabuhan pertama adalah di Sungai Teluk Batang, kedua di Sungai Teluk Melano, ketiga di Pelabuhan Sukadana, dan yang keempat di Sungai Seponti Jaya. Kami terus memantau kapal yang datang dan melakukan bongkar muat hampir setiap hari,"

katanya.

"Untuk dropping sembako, rata-rata menggunakan kapal penumpang atau kapal barang yang berangkat sore dari Pontianak ke Rasau. Pagi harinya sudah sampai ke Kayong, sehingga tidak sempat mengalami pembusukan, seperti sayur dan buah," imbuh Wardana.

Sementara itu, Tokoh Pemekaran Kayong Utara, Abdul Rani, menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa kendaraan barang yang melintas dengan muatan berlebihan justru memberikan dampak buruk bagi

Kayong Utara. "Kita lihat truk-truk yang muatannya menggunung, ini bukan menguntungkan Kayong, melainkan merusak fasilitas jalan di Kayong Utara karena muatan mereka yang berlebihan," tegasnya.

"Saya meminta kepada pihak yang berwenang agar hal ini menjadi perhatian. Sudah tidak ada PAD untuk Kayong, tetapi fasilitas umum rusak dan ini terindikasi menjadi salah satu penyebab inflasi, karena harga tiket yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan pemerintah," pungkasnya. (*dan*)